

# **PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS TERHADAP PENGENDALIAN KAS PADA BIDANG PBB DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**212**

Oleh:

**Sutarti, David Hasibuan dan Suhendra**

*Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan  
Bogor, Indonesia*

Email : sutarti\_stiek@yahoo.com

Submitted:  
APRIL 2015

Accepted:  
AGUSTUS 2015

## **ABSTRACT**

*The intent and purpose of the author in conducting this study was to test and demonstrate empirically on the application of Accounting Information Systems cash receipts and expenditures affecting the control of cash on the UN fields in Bogor District Revenue Office. This study used a descriptive research method, this is because in its implementation, such as data, analysis and interpretation of the meaning and the data obtained. This study is structured as inductive research is finding and collecting data in the field with the aim to determine the factors, form elements, and the nature of the phenomenon in the community. With the Cash Receipts Accounting Information Systems, United Nations field can perform registration activities, data collection, assessment, billing, revenue and services more quickly, organized and on time (up to date) and in the presence of Accounting Information Systems Spending Cash, UN field can be seen available budget either already realized or unrealized in the Financial Statements are prepared in the system.*

*Keywords: Accounting Informasion System, Cash Receipts, Cash Expenditures.*

## **PENDAHULUAN**

Informasi memegang peranan penting bagi perusahaan, sehingga kebutuhan akan informasi juga sangat meningkat, karenanya diperlukan penanganan yang tepat dalam proses pengambilan keputusan terutama yang terkait dengan kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Kecepatan untuk pengambilan keputusan memerlukan keahlian khusus yang didukung oleh adanya informasi dan laporan yang cepat, tepat dan dapat diandalkan. Untuk itu pihak manajemen membutuhkan berbagai informasi, salah satunya adalah melalui sistem informasi akuntansi. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

Kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan akan berjalan dengan lancar dan tersusun dengan rapi apabila di dalam perusahaan tercipta suatu sistem yang baik, efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi akan membantu pihak manajemen untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan.

Aktiva yang paling likuid adalah kas. Kas merupakan alat pertukaran berupa uang atau yang dapat dipersamakan dengan uang, baik yang ada di perusahaan maupun yang ada di bank dan dapat diambil sewaktu-waktu tanpa mengurangi nilai

## **JIAKES**

nominalnya. Kas sangat mudah dipindah tangankan dan dapat dibuktikan kepemilikan, sehingga kas sangat mudah diselewengkan. Oleh karena itu perlu diadakan pengawasan yang tepat terhadap kas dengan menerapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang baik.

Dalam sebuah sistem akuntansi, pengelolaan kas memegang peranan penting bagi perusahaan yang diawali dari penerimaan kas, pengeluaran kas hingga penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan kas dianggap penting karena kesalahan dalam pengelolaan kas dapat berdampak pada tingkat likuiditas perusahaan, karenanya diperlukan suatu pengendalian untuk mengelola kas. Pengendalian merupakan kegiatan pengamatan, pemantauan, penyelidikan dan evaluasi seluruh kegiatan di manajemen agar tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai secara tepat.

Masalah yang sering timbul dalam suatu perusahaan adalah lambatnya proses penyusunan laporan keuangan yang ditimbulkan dari perhitungan aktiva lancar khususnya pada kas, adanya ketidaksesuaian jumlah kas dari hasil perhitungan secara manual dan bukti transaksi / dokumen dengan perhitungan komputerisasi. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara pengelolaan kas dengan sistem akuntansi yang ada. Sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dapat dimanfaatkan untuk membantu pengendalian kas pada perusahaan karena dapat melakukan analisa terhadap hasil kerja penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung setiap saat. Jadi pihak manajemen dapat menyusun dan mengatur langkah selanjutnya serta strategi ekonomi apa yang harus diambil dalam setiap pengambilan keputusannya.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Mulyadi (2003, 45) menyatakan bahwa penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat yang dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang menambah kas perusahaan. Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan berasal dari transaksi penjualan tunai.

Menurut James A. Hall (2006 ,238) terjemahan Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary menjelaskan pengertian penerimaan kas adalah penerimaan pembayaran yang diterima oleh perusahaan, baik yang bersumber dari penjualan tunai maupun piutang, apabila penerimaan bersumber dari piutang maka akan mengurangi saldo akun pelanggan sebesar nilai pembayaran.”

Soemarso S.R (2004 , 172) mengemukakan bahwa penerimaan kas adalah “suatu transaksi yang menimbulkan bertumbuhnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya penjualan hasil produksi, penerimaan piutang maupun hasil transaksi lain yang menyebabkan bertambahnya kas”.

Dalam penerimaan kas terdapat prosedur, menurut Tata Sutabri (2004, 143) ”prosedur penerimaan kas merupakan prosedur seperti penyimpanan segera penerimaan kas, sentralisasi penanganan kas, penyelenggaraan saldo kas minimal dan pencatatan segera atas transaksi-transaksi kas.”

Prosedur penerimaan kas menurut Soemarso S. R (2004, 297) perlu memperhatikan hal-hal berikut : Terdapat pemisahan tugas antara yang menyimpan, menerima dan yang mencatat penerimaan uang. Apabila untuk sebuah perusahaan kecil tidak dapat dilakukan pemisahan, maka penggabungan antara ketiga tugas tadi hanya dapat dilakukan oleh pemilik perusahaan. Setiap penerimaan uang langsung disetor ke bank.

Jadi sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas adalah proses aliran kas yang terjadi secara terus menerus, selama perusahaan masih beroperasi. Aliran kas terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu kesatuan untuk mengumpulkan, mencatat transaksi yang dapat membantu pimpinan untuk menangani penerimaan perusahaan.

Beberapa bentuk pembayaran penerimaan kas dari langganan di dunia usaha yang dikenal antara lain adalah dengan uang tunai, cek, giro, bilyet, transfer lewat bank, dan wesel bank. Cara penerimaan uang dari langganan dapat dilakukan melalui cara :

1. Langganan membayar sendiri atau oleh petugasnya.
2. Harus ditagih oleh kreditur.
3. Kompensasi utang piutang.

Penjualan tunai dilaksanakan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan.

Berdasarkan sistem pengendalian yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan :

1. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check.
2. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit, yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas.

Dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai prosedur yang diterapkan dibagi menjadi :

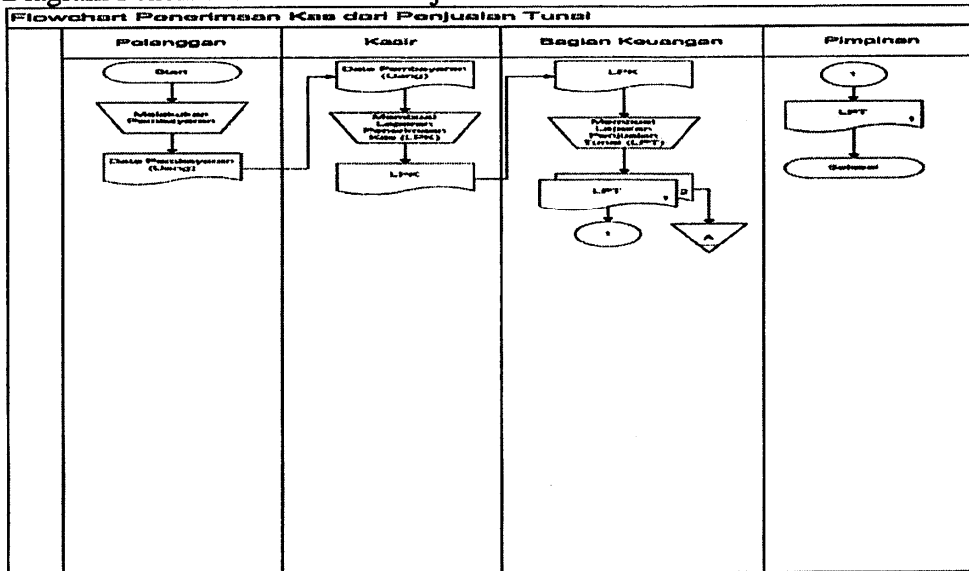
- 1) Penerimaan Kas dari *Over the Counter Sale*
- 2) Penerimaan Kas dari *COD Sales*
- 3) Penerimaan Kas dari *Credit Card Sale*

Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah :

- a) Sistem penjualan harus terpisah dari penjualan tunai
- b) Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi
- c) Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi
- d) Penerimaan order dari pembeli otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai
- e) Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap "lunas" pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur
- f) Penjualan dengan Kartu Debit Bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debit.
- g) Penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi pengiriman otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap "sudah diserahkan" pada faktur penjualan tunai
- h) Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai
- i) Pita register kas bernomor urut dan pemakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan

- j) Kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya
- k) Perhitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksa intern. (<http://ithaafauziaa.blogspot.com/2012>, diunduh pada tanggal 1 Maret 2014).

Diagram Penerimaan Kas Dari Penjualan Tunai



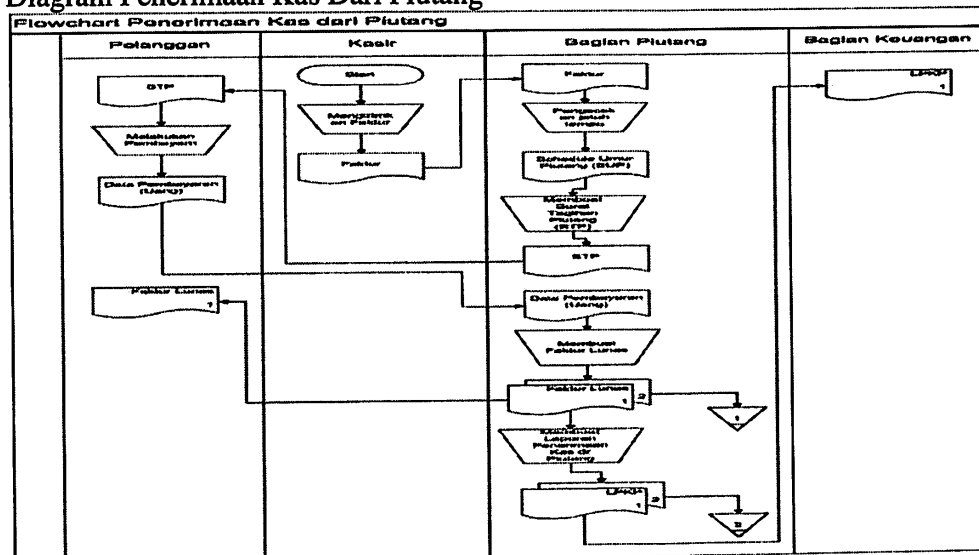
Penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui berbagai cara :

- 1) Melalui penagih perusahaan,
- 2) Melalui pos, dan
- 3) Melalui *Lock-Box collection plan*

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah :

- a) Surat Pemberitahuan.
- b) Daftar Surat Pemberitahuan.
- c) Bukti Setor Bank.
- d) Kuitansi.

Diagram Penerimaan Kas Dari Piutang



Jenis-jenis pengendalian dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya :

- a) Pengendalian umpan balik (*feedback control*) memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang telah selesai dijalankan.
- b) Pengendalian simultan (*concurrent control*) menyesuaikan proses yang sedang berjalan.
- c) Pengendalian ke depan (*feedforward control*) mengantisipasi dan mencegah masalah masalah. (<http://dedesandi69.blogspot.com/2013>, diunduh tanggal 16 Maret 2014)

Proses pengendalian meliputi :

- 1) Menetapkan standar dan patokannya.
- 2) Pengukuran hasil pelaksanaan (*performance*).
- 3) Memperbandingkan antara pelaksanaan dan standarnya.
- 4) Mengambil tindakan perbaikan.

Pengendalian kas dapat dilakukan karena beberapa hal yaitu :

- a. Uang kas dapat berpindahtangan dengan mudah
- b. Tidak ada identifikasi pemilik
- c. Kas adalah aktiva yang paling mungkin untuk diselewengkan dan disalahgunakan oleh para karyawan.
- d. Banyak transaksi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. (<http://bramz88.wordpress.com/2011>, diunduh tanggal 16 Maret 2014).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiono (2011, 1) antara lain metode penelitian adalah metode yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Dalam metode deskriptif digunakan untuk memperoleh data-data yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual mengenai suatu permasalahan yang dihadapi.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui : observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bidang PBB, penerimaan kas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berasal dari 3 sumber kegiatan yaitu :

1. Penerimaan Kas Secara Langsung.
2. Penerimaan Kas Melalui Mobil PBB Keliling.
3. Penerimaan Kas Melalui *Online Banking* / PBB *Online* (ATM).

Sistem Informasi yang diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam pengelolaan bidang PBB adalah :

- 1) Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (i-SISMIOP)
- 2) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

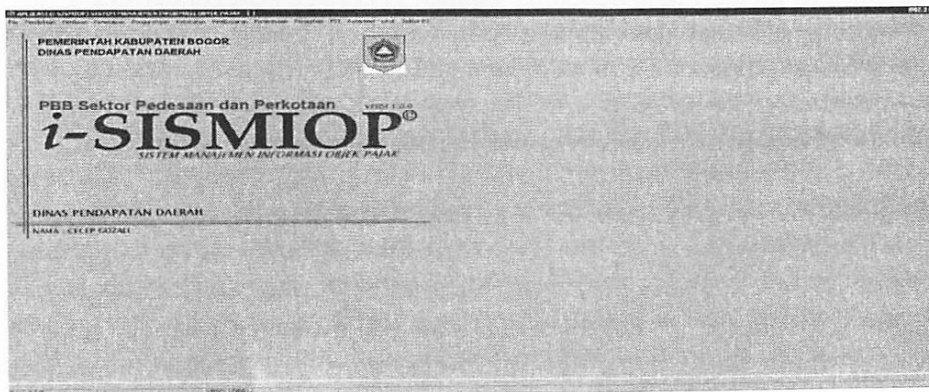
Pemerintah Daerah melalui Kelurahan / Desa bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ke tangan Wajib Pajak dan mengelola penerimaan pembayarannya. Kebijakan lain yang perlu diperhatikan adalah dalam hal pengelolaan penyeteroran pajak terutang. Selain dapat melalui petugas pemungut

kelurahan/desa, kedepannya dapat dilakukan di Bank yang menyelenggarakan *e-payment* seperti halnya ATM dan internet banking.

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan PBB, Dispenda telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang selama ini telah digunakan oleh pemerintah pusat yaitu Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak atau lebih dikenal sebagai i-SISMIOP. i-SISMIOP telah didukung dengan teknologi komputerisasi diharapkan dapat menunjang peningkatan penerimaan PBB yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Bogor. Program i-SISMIOP mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administratif yang dapat mengolah informasi data objek dan subjek pajak melalui komputerisasi, mulai dari proses pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan dan pelayanan. Proses perhitungan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang yang dihitung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diakomodir dengan i-SISMIOP yang dapat mengolah informasi data objek dan subjek pajak secara terorganisir dengan baik melalui proses komputerisasi, sehingga diharapkan dapat menunjang peningkatan penerimaan.

Pengertian Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak adalah :

“Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan computer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.”



**Gambar 1 Tampilan Utama Sistem i-SISMIOP**

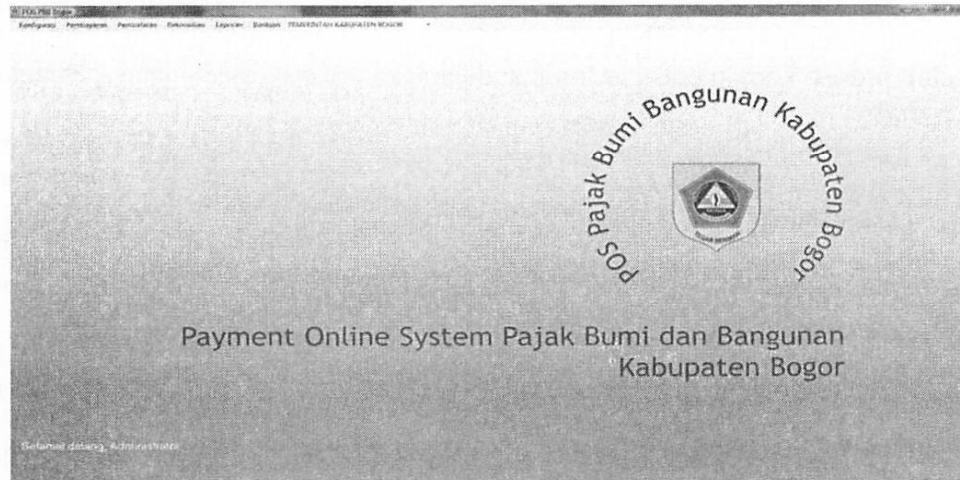
Unsur SISMIOP terdiri dari 5 (lima) unsur dan beberapa subsistem yaitu :

1. Nomor Objek Pajak (NOP).
2. Blok.
3. Zona Nilai Tanah (ZNT).
4. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
5. Program Komputer (*Computer assested valuation / CAV*).

SISMIOP memiliki kelemahan yaitu tidak dapat memvisualisasikan data spasial objek pajak. Untuk itu dibuat sebuah sistem yang terintegrasi ke dalam SISMIOP yang dapat membantu untuk melakukan analisis data spasial. Karena perlu upaya mengoptimalkan fungsi-fungsi organisasi baik dalam bidang pengadministrasian, pelayanan, dan pengambilan keputusan serta dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti : Sistem Informasi *Payment On-line System* (POS), Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Pelayanan Informasi Telepon (PIT).

Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Pelayanan Informasi Telepon (PIT) dimulai dari :

1. *Payment On-line System* (POS).



**Gambar 2 Menu Utama POS PBB Sebagai Pendukung i-SISMIOP**

2. Sistem Informasi Geografis (SIG).
3. Pelayanan Informasi Telepon (PIT).

SISMIOP merupakan sebuah sistem manajemen PBB yang terintegrasi. Untuk membentuknya memerlukan beberapa tahapan pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
- 2) Pendataan Objek dan Subjek Pajak.

Jenis Formulir	<input type="text"/>
Jenis Transaksi	<input type="text"/>
No. Formulir	<input type="text"/>
NOP	<input type="text"/>
NOP Bersama	<input type="text"/>
NOP Asal	<input type="text"/>

**Gambar 3 Tampilan Pendataan dalam SISMIOP**

- 3) Penilaian.



192.168.1.203 - Remote Desktop Connection

APLIKASI (-SISMIOP) SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK - [Lihat Status Pembayaran]

NOP: 32 03 191 009 006 0034 0

Tekan AR-N untuk ganti NOP

Nama Wajib Pajak: RIVAH UJIANG  
 Jalan Objek Pajak: JL PRASAJA  
 Jalan Wajib Pajak: KP BULAK

Blok Kav No: [ ]  
 Blok Kav No: [ ]

Tahun	Jatuh Temp	PBB	Denda	Jml Bayar	ke	Tgl Bayar	Tgl Rekam	Perekam	Bank
2002	30/09/2002	12,068	5,793						
2003	30/08/2003	12,068	5,793						
2004	31/08/2004	12,068	5,793						
2005	20/09/2005	6,468	3,105						
2006	31/10/2006	6,468	3,105						
2007	31/10/2007	9,240	4,435						
2008	29/08/2008	12,474	5,968						
2009	31/08/2009	12,474	0	12,474	1	25/06/2009	05/08/2009	06000000	KPP CIAWI
2010	31/08/2010	12,474	0	12,474	1	25/06/2010	15/07/2010	06000000	KPP CIAWI
2011	31/09/2011	16,632		21,289	1	24/10/2012	24/10/2012	99913TOBING	BRI BOJONG GEDE
2012	31/09/2012	19,295		19,027	1	24/10/2012	24/10/2012	99913TOBING	BRI BOJONG GEDE
2013	31/09/2013	24,394		24,882	1	03/09/2013	03/09/2013	99913TOBING	BRI BOJONG GEDE
2014	31/08/2014	32,525	0	32,525	1	12/08/2014	12/08/2014	Zbri-192.168	BRI DISPENDA-1

\*) jika belum lunas, denda per tanggal 13/08/2014  
 \*\*) jika belum lunas dan mengajukan pengurangan sanksi administrasi, denda dihitung sejak pengajuan PST

Cetak SKL    Cetak Catatan pembayaran    Keluar

Gambar 4 Tampilan Pemantauan Penerimaan dalam SISMIOP

### Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Merupakan Sistem Keuangan yang diterapkan pada seluruh Badan Pemerintahan se-Kabupaten Bogor dan sistem ini memberi *link* kepada DPKBD selaku badan pengelolaan keuangan dan barang di Kabupaten Bogor dengan seluruh badan pemerintahan yang ada agar menyampaikan informasi keuangan baik dari penghimpunan data penerimaan dan pengeluaran kepada DPKBD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah).

SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah atau Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya

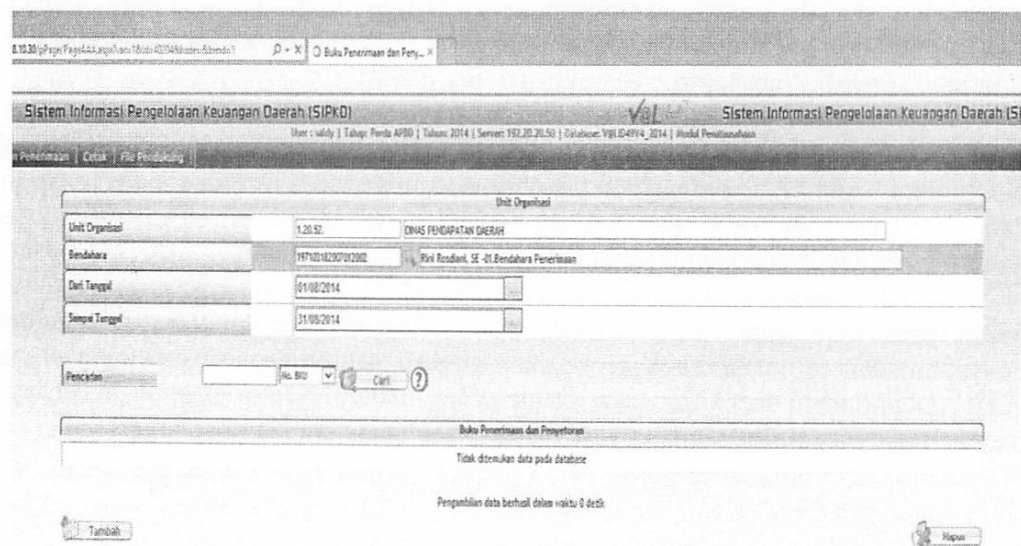




Gambar 5 Tampilan Menu Utama SIPKD

Dasar hukum dalam pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) :

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.



Gambar 6 Tampilan setelah Log-in sistem SIPKD

Didalam SIPKD terdapat beberapa prinsip dasar dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) :

- a) Kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal;
- b) Ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat;
- c) Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran; dan

- d) Adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik.

### Prosedur Penerimaan Kas secara Langsung

Prosedur awalnya dimulai dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang menggunakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (i-SISMIOP) dalam Proses pembuatan SPPT mulai dari pendaftaran, pendataan, penilaian, perekaman dan pemeliharaan basis data. Dari sistem program i-SISMIOP pendaftaran dan pendataan Objek dan Subjek Pajak dilakukan. ketika semua proses selesai dan Dinas Pendapatan Daerah kemudian menarik penerimaan dari para Wajib pajak dengan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebagai surat pemberitahuan besarnya PBB yang terutang oleh Wajib Pajak.

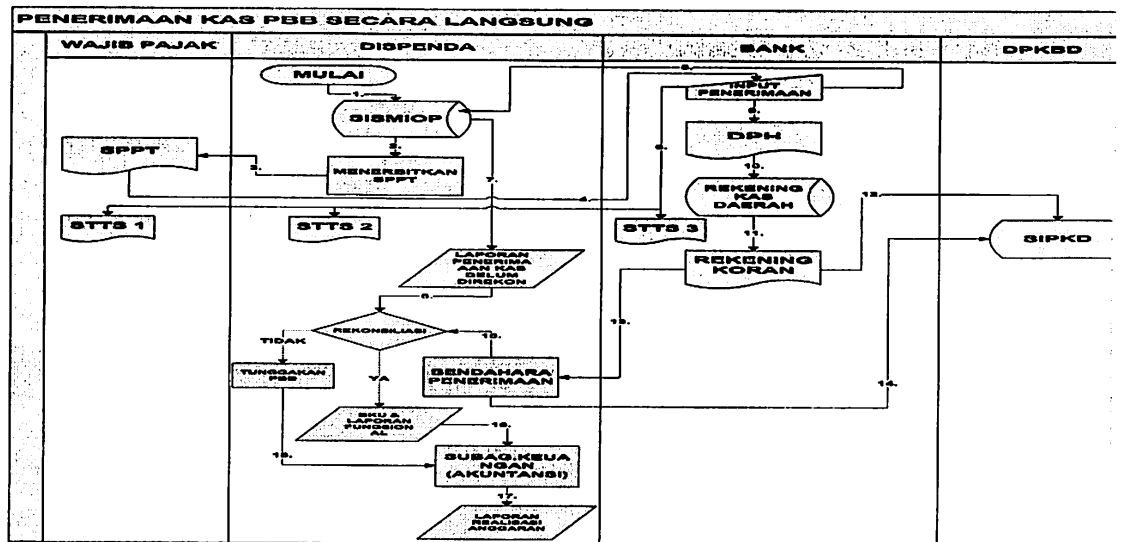
Proses input penerimaan dari Wajib Pajak yang telah mendapat STTS dilakukan dan data disalurkan pada sistem program i-SISMIOP sebagai basis dari program pendataan PBB Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Proses input data penerimaan yang terjadi di Bank oleh Petugas Bank dan setelah itu petugas Bank akan menyertakan bukti pembayaran kepada Wajib Pajak yaitu berupa STTS (Surat Tanda Terima Setoran) sebagai pernyataan bahwa Wajib Pajak telah melunasi kewajibannya. Lampiran bukti STTS diserahkan kepada pihak DISPENDA Bogor.

Data penerimaan yang telah diterima DISPENDA melalui i-SISMIOP selanjutnya disatukan dalam Laporan Penerimaan Kas Belum Direkon. Data Laporan Penerimaan Kas Belum Direkon akan dilakukan Rekonsiliasi antara bagian PBB sebagai pengelola penerimaan PBB dengan Bendahara Penerimaan DISPENDA Bogor.

Selanjutnya dipihak Bank, penerimaan PBB yang dilaksanakan dicatat dan didata pada Daftar Penerimaan Harian (DPH) yang merupakan kumpulan dari penerimaan PBB dari WP selama satu hari. Kemudian dari DPH data penerimaan beserta uang pembayaran PBB oleh Wajib Pajak akan dimasukkan ke dalam Rekening Kas Daerah Bank yang bersangkutan dalam hal ini hanya Bank BJB (Bank Jabar Banten) dan BRI (Bank Rakyat Indonesia). Diterbitkanlah rekening koran untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (DISPENDA) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD). Rekening Koran yang diterbitkan Bank akan disalurkan kepada Bendahara Penerimaan yang berada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (DISPENDA) untuk diinput di sistem SIPKD yang memiliki Link dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD).

Fungsi	Tanggal Sub	Rekening	Uraian	Edit
07342/1.20.52.513/24/2014	01/04/2014	048.02402004.2	Set Pajak Belanja 12 Berhak	Edit
07347/1.20.52.513/24/2014	01/04/2014	048.02402004.2	Set Pajak Penangan Jalan 6 Berhak	Edit
07348/1.20.52.513/24/2014	01/04/2014	048.02402004.2	Set Pajak Air Tanah 19 Berhak	Edit
07383/1.20.52.513/24/2014	01/04/2014	048.02402004.2	Set Pajak Hotel 2 Berhak	Edit
07398/1.20.52.513/24/2014	01/04/2014	048.02402004.2	SPHTB Pihak 1 April 2014	Edit

Gambar 7 Tampilan Proses Input Bendahara Penerimaan



Gambar 8 Bagan Alur Kas Penerimaan PBB Secara Langsung

Pelaksanaan pengelolaan pengeluaran dan biaya di bidang PBB Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional hanya di bidang PBB. Pihak-pihak yang terkait dan mempunyai peranan penting adalah :

1. Bank
2. KPA Bidang PBB dan PPK
3. Bendahara Pengeluaran DISPENDA
4. Subag. Keuangan
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor (DPKBD)
6. Pihak Ketiga

Pengaruh yang dapat dilihat dari Penerimaan kas yang telah menerapkan SIA pada bidang PBB antara lain :

- 1) Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas, bidang PBB dapat melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan dan pelayanan dengan lebih cepat, terorganisir dan tepat waktu (*up to date*).
- 2) Penerimaan PBB lebih cepat dalam mencapai target yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi yang dapat digunakan secara *online* dimanapun petugas berada (Mobil PBB Keliling) bahkan melalui ATM, karena wajib pajak semakin dipermudah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak didukung oleh fasilitas yang canggih dan aman.
- 3) Data yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan ini menjadi sangat baik dan berkualitas dikarenakan hanya beberapa bagian tertentu yang dapat mengakses dan bertanggung jawab pada program sistem tersebut, jadi tidak sembarang orang dapat mengaksesnya.
- 4) Dengan adanya sistem ini memberi pengaruh dalam mengurangi efek kesalahan dan lebih efisien dalam hal menginput data PBB dan data keuangan.
- 5) Dalam hal pengendalian pelaporan sudah diterapkan Sistem Informasi Akuntansi yang dapat membantu pembuatan dari BKU (Jurnal Harian) sampai pembuatan Laporan Keuangan (LRA, CALK dan Neraca).

Pengaruh dengan diterapkan SIA pada bidang PBB antara lain :

- 1) Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas bidang PBB dapat melihat anggaran yang tersedia baik yang sudah terealisasi ataupun yang belum terealisasi dalam Laporan Keuangan yang dibuat di sistem.
- 2) Data penggunaan anggaran dapat dikirim dan memiliki *link* melalui sistem keuangan Bendahara Pengeluaran kepada Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan daerah yang memiliki sistem yang sama.
- 3) Seperti halnya penerimaan, dalam sistem pengeluaran kas pun tidak sembarang orang dapat mengakses. Hanya Bendahara Pengeluaran Bidang PBB dan Subag, Keuangan saja yang dapat menggunakan sistem pengeluaran.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Dalam hal ini penerimaan, DISPENDA telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan prosedur dan *standart* yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Untuk kegiatan pengeluaran telah sesuai peraturan undang-undang dan standart yang berlaku sehingga dapat mengontrol dan mengawasi penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pelaporan keuangan sebagai indikator dari pengendalian kas, telah diterapkan dalam sistem yang dapat mempermudah pengguna dan memperkecil resiko kesalahan pelaporan dari bagian Bendahara dan Keuangan.

### **Saran**

Saran yang dapat diterapkan untuk memajukan sistem yang sudah terkelola dengan baik adalah :

- 1) Agar dipasang koneksi dan jaringan internet yang lebih berkualitas agar bagian-bagian di Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja dengan lebih optimal terutama yang berkenaan dengan penerimaan.
- 2) Perlu dikembangkan sistem pelatihan terhadap sumber daya manusia secara berkala yang dapat memberi manfaat untuk bagian pengeluaran dan seluruh bagian terkait, guna mengurangi resiko *human error*.
- 3) Data laporan keuangan yang telah dihasilkan sistem tidak dapat dicopy secara manual oleh karena itu harus ada modifikasi atau penambahan kemampuan untuk memproses data dari sistem ke dalam proses manual untuk kepentingan koreksi internal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bodnar, Hoopwood. 2006. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- B. Romney Marshall, Steinbart P. John. 2003. *Accounting Information System*. Practice Hall.
- James A. Hall. 2009. *Accounting Information System*. Edisi 4 Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.
- James A, O' Brien. 2005. *Introduction to Information System*. Jakarta. Salemba Empat

- Kieso Donald E., Weygandt Jerry J. dan Kimmel Paul D. 2010. *Accounting Principles International Student Version*. John Wiley & Sons, Inc
- Kieso Donald E, Weygandt Jerry J, Warfield Terry D. 2005. *Intermediate Accounting Eleventh Edition*. Jakarta. Erlangga
- Krismiadi. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : ANDI
- Mc. Leod Raymond, Schell George. 2004. *Management Information system tenth edition*, Terjemahan Tim Penerjemah PT. Indeks Edisi 8. Jakarta
- Narko. 2004. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Yayasan Pusaka Nusantara.
- Post. Gerald V, Anderson. David L. 2003. *Management Information Systems. Third Edition*. Mc Graw : Hill Irwin.
- Reeve James M., Warren Carl S., Duchac Jonathan E., et al., 2008. *Principle of Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta : Salemba Empat.
- S R, Soemarso. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku satu. Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sutabri, Tata. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. ANDI: Yogyakarta
- Wilkinson, Joseph W. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi dan Informasi Edisi Ketiga*. Jakarta : Binarupa Aksara
- Winarno, Wahyu, Wing. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Kelima*. Yogyakarta : YKPN.